



ANALISA

17 Januari 2026

Vol. 0001

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi Tempo.co



Yuna Farhan

Secretary of Advisory Board
at The Reform Initiatives (TRI)

Jebakan Ilusi Kebijakan Fiskal

Kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang nyaris 3 persen tidak hanya menjadi alarm jebakan “ilusi fiskal”, tapi juga mencerminkan persoalan serius ketidakseimbangan ekosistem fiskal.

Ilusi fiskal adalah istilah yang dipopulerkan James M. Buchanan, peraih Hadiah Nobel Ekonomi 1986. Istilah ini mengacu pada kebijakan publik tidak jelas yang membuat kebanyakan orang meremehkan dampak jangka panjangnya.

Ilusi fiskal tampak nyata dalam deretan program populis beranggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan proyek ketahanan pangan. Meski bertujuan mulia, program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026, yang menyerap lebih dari separuh anggaran, berisiko menjadi jebakan fiskal jika tidak ditopang tata kelola yang ketat.

Program-program itu seolah-olah tidak membebani pembayar pajak saat ini. Beban fiskalnya dirasakan secara tidak langsung melalui distribusi sumber daya yang tidak efisien dan pengabaian alokasi pada sektor-sektor lain. Padahal pembiayaan defisit tersebut akan diwariskan kepada generasi mendatang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang pemerintah dan pemberlakuan pajak yang tinggi. Di sinilah ilusi fiskal bekerja secara nyata.

Realisasi defisit APBN yang nyaris 3 persen hanya terjadi pada masa pandemi Covid19, ketika ekonomi redup, sementara penanganan infeksi membutuhkan biaya besar. Setelah pandemi berlalu dan kini defisit kembali ke 3 persen, Indonesia memasuki fase "musim dingin" ancaman ilusi fiskal.

Keseimbangan primer yang terus negatif sejak 2012 menyingkap kegagalan struktural yang sudah lama terjadi. Pemerintah selalu mengklaim utang kita aman karena masih jauh dari batas 60 persen produk domestik bruto. Padahal beban sesungguhnya ada pada rasio pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang berulang kali melampaui ambang aman Dana Moneter Internasional sebesar 25-35 persen PDB. Sementara itu, rasio dan pendapatan pajak mandek serta tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Ilusi fiskal berakar dari ketimpangan relasi kuasa. Kebijakan fiskal tidak lahir dari ruang teknokratis yang steril, tapi dari interaksi jejaring aktor dalam ekosistem fiskal yang dinamis (Krafchik dan Renzio, 2025), dari lembaga eksekutif dan legislatif, lembaga pemeriksa, hingga masyarakat sipil serta kepentingan bisnis dan politik informal yang turut menentukan arah anggaran. Ketika kekuasaan fiskal terkonsentrasi pada satu aktor, keseimbangan ekosistem runtuh dan memicu ilusi akuntabilitas.

Pola ini menandai dimulainya otokrasi fiskal (Renzio dan Foti, 2025). Sentralisasi fiskal melalui pemangkasan transfer ke daerah, dana ekstrasubjekter lewat pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang mengelola langsung dividen badan usaha milik negara, serta penggerusan sistematis terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bagaimana otoritas fiskal makin dijauhkan dari pengawasan demokratis. Di titik ini, kebijakan anggaran tidak lagi menjadi instrumen kesejahteraan publik, tapi sebagai alat konsolidasi kekuasaan.

Dewan Perwakilan Rakyat, sementara itu, yang seharusnya menjadi pengimbang lembaga eksekutif, mundur dalam mengawasi kebijakan fiskal pemerintah. Fungsi penganggaran dan pengawasan makin tereduksi menjadi arena negosiasi politik jangka pendek. DPR terus setuju terhadap kebijakan populis berbiaya tinggi tanpa kontrol berarti. Akibat kehilangan akuntabilitas itu, risiko fiskal menumpuk dalam jangka panjang.

Sementara pada masa Orde Baru DPR dikenal sebagai rubber stamp bagi usulan eksekutif, hari ini DPR bertransformasi menjadi fasilitator agenda fiskal eksekutif (Wadipalapa et al, 2025). Kondisi ini diperparah oleh struktur koalisi pemerintahan yang gemuk, yang membuat anggota DPR enggan mengkritik anggaran kementerian yang dipimpin ketua umum partainya.

BPK juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan otoritas dan kepercayaan publik. Pada awal Reformasi, di bawah kepemimpinan Anwar Nasution, BPK cukup disegani. Hasil auditnya menjadi rujukan penting bagi publik dan pemerintah. Kini peran BPK cenderung tersisih dalam ekosistem fiskal. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pun kian dipandang sebagai capaian administratif, bukan kekuatan pengawasan substantif.

Menguatnya peran politik informal, melalui koalisi partai yang dipimpin elite, telah secara perlahan menggeser keseimbangan kekuasaan dalam ekosistem fiskal. Koalisi partai penguasa menjadi aktor

penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal, dengan pengaruh yang terjalin melalui presiden, kementerian sektoral, dan parlemen.

Akibatnya, keputusan fiskal lebih banyak ditentukan oleh negosiasi elite, kesepakatan informal, dan pengaruh di belakang layar ketimbang melalui proses yang transparan serta berbasis kepentingan publik. Konsekuensinya, biaya dan risiko kebijakan fiskal tersamarkan. Ilusi fiskal James Buchanan benar-benar tengah bekerja dalam politik anggaran kita hari ini.

Untuk keluar dari jebakan ilusi fiskal, diperlukan pemulihan keseimbangan ekosistem. Relasi kuasa yang berimbang antara lembaga eksekutif, DPR, dan BPK adalah prasyarat disiplin fiskal yang sehat serta berkelanjutan. DPR harus mengembalikan fungsi anggarannya sebagai instrumen kontrol substantif dengan membuka ruang partisipasi publik, sementara BPK memperkuat legitimasi melalui pengawasan dan audit kinerja yang bermakna.

Tanpa pembenahan tata kelola yang serius, pengelolaan fiskal yang serampangan akan membawa kita ke dalam jebakan anggaran yang membuka pintu kehancuran.

Associate Partner Publication

TEMPO

A summary of this article was published on **Tempo**
January 17, 2026.

<https://koran.tempo.co/read/opini/495795/ilusi-kebijakan-fiskal-prabowo-subianto>